

Pengaruh Kemandirian, Efisiensi, Kinerja Keuangan dan Rasio Utang Terhadap *Financial Sustainability* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Putri Meylina, Sandrayati, Anggeraini Oktarida

Politeknik Negeri Sriwijaya

putrimeylina2305@gmail.com, sandradewasaputra@gmail.com,

anggeraini_oktarida@polsri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of independence, efficiency, financial performance and debt ratio on financial sustainability in districts/cities in South Sumatra province. The data used in this study is secondary data with data obtained through the EPPID website of the Central Audit Agency of the Republic of Indonesia in 2020-2023. This type of research is a quantitative research. The sample of this study is 17 regencies/cities in South Sumatra Province. The sample determination in this study used the purposive sampling technique. The data analysis method uses multiple linear regression analysis with the help of Eviews 12 for windows. The results of this study can be concluded that partially independence and efficiency have a positive and significant effect on financial sustainability, while financial performance has a negative and significant effect on financial sustainability and debt ratio has no effect on financial sustainability. Simultaneously, the ratio of independence, efficiency, financial performance, and debt ratio has a significant effect on financial sustainability in Regencies/Cities in South Sumatra Province in 2020-2023.

Keywords: *Financial Sustainability, Independence, Efficiency, Financial Performance and Debt Ratio*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemandirian, efisiensi, kinerja keuangan dan rasio utang terhadap *financial sustainability* pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data yang diperoleh melalui *website EPPID* Pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2020-2023. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan Eviews 12 for Windows. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial kemandirian dan efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial sustainability*, sedangkan kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial sustainability* dan rasio utang tidak memiliki pengaruh terhadap *financial sustainability*. Secara simultan rasio kemandirian, efisiensi, kinerja keuangan dan rasio utang berpengaruh signifikan terhadap *financial sustainability* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020-2023.

Kata Kunci: *Financial Sustainability, Kemandirian, Efisiensi, Kinerja Keuangan dan Rasio Utang*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) menjadi agenda penting dalam otonomi daerah di Indonesia. Kemampuan suatu pemerintah daerah untuk mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dalam jangka panjang, atau yang dikenal sebagai *Financial Sustainability*, merupakan syarat utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. *Financial Sustainability* memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai layanan publik, investasi pembangunan, dan merespons gerakan ekonomi di masa depan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Financial Sustainability merupakan syarat penting bagi pemerintah daerah di seluruh dunia termasuk Indonesia, untuk menjamin penyediaan layanan publik yang berkelanjutan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan (Jones & Walker, 2006:64). Di era desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin mandiri dalam mengelola keuangannya. Namun, tantangan seperti inefisiensi pengelolaan, kinerja keuangan yang fluktuatif, dan beban utang yang meningkat dapat mengancam *Financial Sustainability* daerah, menghambat kemampuan dalam mencapai kemandirian keuangan yang optimal (Halim & Bawono, 2010:132).

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan beragam karakteristik antar daerah, menghadapi tantangan unik dalam mewujudkan *Financial Sustainability* di tingkat lokal. Provinsi Sumatera Selatan, dengan potensi ekonomi dan demografi yang signifikan, juga memiliki dinamika keuangan daerah yang bervariasi antar Kabupaten/Kota. Mardiasmo (2009:125) menyatakan bahwa “kemandirian keuangan yang tinggi akan meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa tergantung pada pemerintah pusat, yang pada akhirnya memperkuat *financial sustainability*”.

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai salah satu Provinsi dengan potensi sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia, memiliki beragam karakteristik Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Beberapa Kabupaten/Kota menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan kemandirian, efisiensi, dan kinerja keuangan yang solid. Namun, tantangan terkait tingginya rasio utang juga masih menjadi perhatian di beberapa daerah. Utang yang tinggi sangat berpengaruh terhadap *Financial Sustainability*, terutama apabila tidak digunakan untuk pembiayaan yang bersifat produktif, tidak disertai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tidak dikelola secara transparan dan terukur. Utang yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas keuangan dapat memperbesar beban bunga dan cicilan, sehingga mengurangi keuangan untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik (BPK RI, 2020:39). Selain itu, beban utang yang tinggi juga membatasi fleksibilitas anggaran dan meningkatkan risiko keuangan jika terjadi penurunan pendapatan atau krisis ekonomi. Dengan kata lain, semakin tinggi beban utang tanpa didukung oleh kemampuan bayar yang memadai, maka semakin besar potensi ketidakseimbangan keuangan dan semakin rendah tingkat keberlanjutan keuangan pemerintah daerah (Permenkeu No. 179/PMK.07/2020).

Lebih lanjut, efisiensi pengelolaan keuangan daerah menjadi isu penting. Praktik pengelolaan anggaran yang kurang efektif dan efisien dapat menyebabkan pemborosan dan inefisiensi alokasi sumber daya, pada akhirnya mengurangi kemampuan daerah untuk mendanai program prioritas secara berkelanjutan. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah berperan penting dalam mewujudkan *Financial Sustainability*. Pemerintah daerah yang mampu menggunakan sumber daya secara efisien akan menghasilkan *output* atau pelayanan publik dengan biaya yang lebih rendah, tanpa mengurangi kualitas layanan. Hal ini menciptakan keuangan yang lebih luas untuk investasi jangka panjang & penguatan kapasitas keuangan daerah. Suwandi (2018:89), “efisiensi belanja daerah yang tinggi mampu meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, sehingga memperkuat *Financial Sustainability*”. OECD (2023:17) menekankan bahwa efisiensi anggaran publik adalah komponen kunci dalam menjaga kesinambungan keuangan publik dalam jangka panjang.

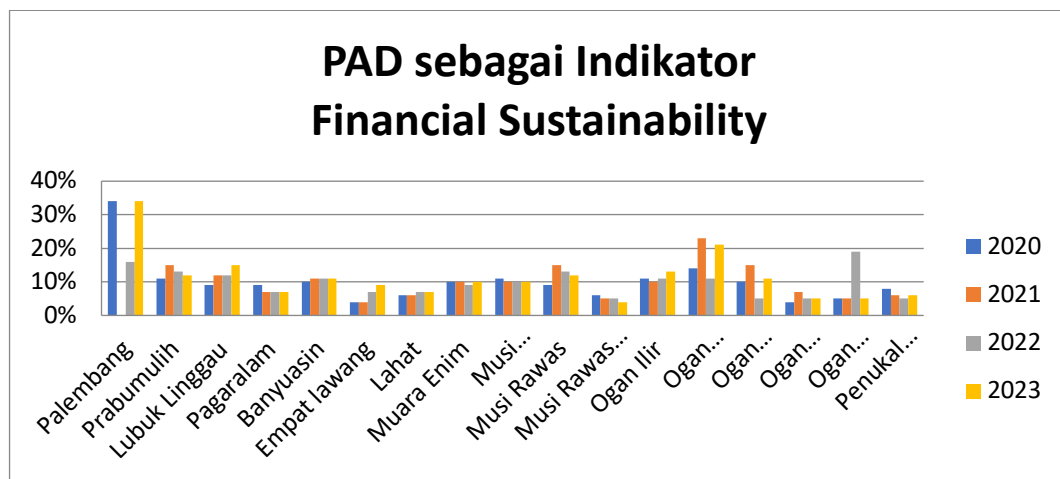
Kemandirian keuangan merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kapasitas suatu pemerintah daerah dalam membiayai belanja dan pembangunannya tanpa bergantung secara berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan, semakin besar pula kemampuan daerah dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan secara otonom dan berkelanjutan. Mahmudi (2019:26) menyatakan “daerah yang mandiri secara keuangan cenderung memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih tinggi, dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan, serta lebih mampu menghadapi risiko keuangan di masa mendatang”. Sebaliknya, ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan dapat menghambat kemandirian kebijakan dan melemahkan keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mengukur tingkat kemandirian keuangan sangat penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan dan daya tahan keuangan suatu pemerintah daerah.

Kinerja keuangan merupakan salah satu aspek krusial dalam mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Evaluasi kinerja keuangan tidak hanya menggambarkan tingkat realisasi anggaran, tetapi juga menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara optimal. Mahmudi (2019:36), menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang baik ditandai dengan proporsi pendapatan asli daerah yang tinggi, pengelolaan belanja yang efisien, serta keseimbangan keuangan yang terjaga antara pendapatan dan belanja. Kinerja keuangan yang positif menunjukkan kemampuan keuangan yang kuat, yang sangat penting dalam mendukung *Financial Sustainability* jangka panjang. Pemerintah daerah yang mampu menjaga stabilitas keuangan dan efisiensi penggunaan anggaran cenderung lebih siap menghadapi tekanan keuangan, termasuk perubahan kebijakan pusat atau krisis ekonomi. Sebaliknya, kinerja keuangan yang buruk dapat menyebabkan ketidakseimbangan keuangan, peningkatan defisit, dan ketergantungan yang tinggi pada bantuan keuangan dari pusat (Halim, 2007:83). Oleh karena itu, kinerja keuangan menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menjaga

kesinambungan keuangan dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya secara berkelanjutan.

Rasio utang merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas keuangan dan tingkat risiko keuangan pemerintah daerah. Rasio ini mengukur sejauh mana kewajiban utang daerah dapat ditanggung oleh kemampuan keuangannya, seperti PAD atau total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio utang terhadap pendapatan, semakin besar beban keuangan yang harus ditanggung di masa depan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020, rasio utang daerah terhadap pendapatan tidak boleh melebihi batas tertentu agar tidak membahayakan stabilitas keuangan daerah. Utang yang tidak dikelola dengan baik, apalagi jika tidak digunakan untuk pembiayaan yang produktif, berisiko menimbulkan tekanan keuangan dan menurunkan fleksibilitas anggaran di masa mendatang. Menurut BPK RI (2020:39), utang daerah yang tinggi, tanpa peningkatan kapasitas penerimaan daerah atau efisiensi belanja, dapat mengganggu *financial sustainability*. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan rasio utang secara hati-hati menjadi penting dalam kerangka tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada pengaruh kemandirian keuangan, yang tercermin dalam kemampuan menghasilkan PAD (Mardiasmo, 2009:134) efisiensi pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya daerah (Bastian, 2010:128), kinerja keuangan yang mencerminkan kesehatan keuangan secara keseluruhan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 90), dan rasio utang yang menunjukkan tingkat kewajiban keuangan daerah (Jones & Walker, 2006:57) terhadap *Financial Sustainability* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pemahaman mengenai bagaimana keberlanjutan keuangan ditingkat lokal Sumatera Selatan menjadi penting untuk merumuskan rekomendasi yang tepat sasaran.



Gambar 1. PAD sebagai Indikator *Financial Sustainability*

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa Kota Palembang memiliki PAD yang relatif tinggi pada tahun 2020, mengalami penurunan di 2021 dan 2022, lalu

kembali naik di 2023. Pada Kota Prabumulih menunjukkan tren yang cukup stabil dengan sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022. Sedangkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara konsisten memiliki PAD yang rendah, menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada sumber pendapatan lain selain PAD. Meningkatnya porsi PAD dari tahun ke tahun menandakan bahwa daerah semakin mandiri secara keuangan. *Financial Sustainability* terjadi ketika suatu daerah tidak bergantung penuh pada transfer Pemerintah Pusat, tetapi dapat membiayai pengeluarannya dengan pendapatan sendiri, terutama PAD. Halim (2019:87) menyatakan bahwa “semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut, dan semakin besar pula peluang untuk mencapai keberlanjutan keuangan. Mardiasmo (2021:139) menyatakan bahwa “salah satu indikator keberlanjutan keuangan adalah pertumbuhan dan kontribusi PAD yang stabil terhadap total pendapatan daerah”.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2023:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan desain penelitian studi pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*) untuk menguji pengaruh antar variabel. Menurut Sugiyono (2023:13) Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *output* Eviews 12 di atas, maka penulis dapat menjelaskan dan menguraikan seberapa besar pengaruh kemandirian, efisiensi, kinerja keuangan dan rasio utang terhadap *Financial Sustainability*.

Pengaruh Kemandirian Secara Parsial terhadap *Financial Sustainability*

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis t diketahui bahwa variabel Kemandirian memiliki t_{hitung} sebesar 2.600808. Nilai t_{hitung} tersebut menunjukkan angka lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,13145 atau ($2.600808 > 2,13145$). Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh variabel Kemandirian sebesar 0,0124 yang menunjukkan bahwa $0,0124 < 0,05$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability*, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

Kemandirian keuangan mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), tanpa bergantung secara dominan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana eksternal menunjukkan adanya komitmen jangka panjang

terhadap keberlanjutan keuangan, yang merupakan esensi dari perilaku *stewardship*. Kemandirian keuangan yang tinggi juga memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengatur prioritas anggaran, merespons kebutuhan masyarakat lokal, serta menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini mendukung teori *Stewardship*, teori ini berpendapat bahwa pengelola organisasi publik, dalam hal ini pemerintah daerah, bertindak sebagai *steward* yang memiliki integritas, tanggung jawab moral, dan komitmen terhadap kepentingan jangka panjang organisasi dan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, seorang *steward* tidak hanya mengelola anggaran untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berupaya mewujudkan kemandirian keuangan guna meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan daerah secara keseluruhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putri Patli Aryasi (2023:45) dan Arif et al., (2024:38) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability*.

Pengaruh Efisiensi Secara Parsial terhadap *Financial Sustainability*

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis t diketahui bahwa variabel Efisiensi memiliki t_{hitung} sebesar 2,268119. Nilai t_{hitung} tersebut menunjukkan angka lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,13145 atau ($2,268119 > 2,13145$). Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh variabel Efisiensi sebesar 0,0280 yang menunjukkan bahwa $0,0280 < 0,05$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability*, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

Dalam hal efisiensi, pemerintah daerah sebagai *steward* akan berusaha mengelola anggaran secara optimal, yaitu meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran publik memberikan nilai yang maksimal. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mencerminkan adanya kepedulian terhadap penggunaan sumber daya secara tepat guna, serta komitmen untuk memberikan hasil terbaik dari setiap unit belanja. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal dan hemat, untuk menghasilkan *output* pelayanan publik yang maksimal. Pemerintah daerah yang efisien akan mampu mengalokasikan dan menggunakan anggaran dengan bijaksana, menghindari pemborosan, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Tingkat efisiensi yang tinggi dapat meningkatkan daya tahan keuangan daerah terhadap tekanan pembiayaan jangka panjang, sehingga mendukung terciptanya keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*).

Temuan ini sejalan dengan teori *stewardship*, yang memandang bahwa pejabat publik berperan sebagai pengelola (*steward*) yang bertanggung jawab secara moral dan sosial terhadap sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Seorang *steward* tidak hanya mengejar kepatuhan administratif, tetapi juga berkomitmen pada penggunaan sumber daya yang efisien dan bernilai guna tinggi bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip *stewardship*, pengelola keuangan daerah akan lebih berhati-hati dalam merencanakan anggaran, mengutamakan efektivitas belanja, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat

jangka panjang. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efisien merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai *stewardship*, karena mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan publik. Semakin efisien suatu daerah dalam mengelola keuangannya, maka semakin besar peluang untuk menjaga keberlanjutan fiskal yang stabil dan berkelanjutan di masa mendatang. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putri Patli Aryasi (2023:52) yang menyatakan bahwa efisiensi berpengaruh positif terhadap *Financial Sustainability*.

Pengaruh Kinerja Keuangan Secara Parsial terhadap *Financial Sustainability*

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis t diketahui bahwa variabel kinerja keuangan memiliki t_{hitung} sebesar -3,808390. Nilai t_{hitung} tersebut menunjukkan angka lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,13145 atau $(-3,808390 < 2,13145)$. Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh variabel kinerja keuangan sebesar 0,0004 yang menunjukkan bahwa $0,0004 < 0,05$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial kinerja keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financial Sustainability*, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

Berdasarkan hasil uji statistik, diketahui bahwa variabel kinerja keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financial Sustainability*. Artinya, semakin tinggi kinerja keuangan yang dicapai suatu daerah, maka dapat menurunkan tingkat keberlanjutan keuangannya. Jadi, semakin baik kinerja keuangan maka *financial sustainability* menurun atau sebaliknya. Hasil ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja keuangan belum sepenuhnya mencerminkan penguatan keuangan jangka panjang. Sejalan dengan fenomena penelitian, kondisi ini mencerminkan **ketidaksesuaian antara potensi ekonomi dan realitas keuangan daerah, dimana** PAD yang rendah, efisiensi anggaran yang lemah, serta peningkatan utang yang tidak produktif justru melemahkan daya tahan keuangan. Seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2023:87), kinerja keuangan yang hanya berfokus pada serapan anggaran tanpa memperhatikan *outcome* dan efisiensi dapat memperlemah keberlanjutan keuangan. OECD (2023:14) juga menekankan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah harus dikaitkan langsung dengan kesehatan keuangan jangka panjang, bukan hanya pencapaian indikator jangka pendek.

Dari sudut pandang teori *stewardship*, hasil ini dapat dijelaskan bahwa pejabat publik sebagai *steward* seharusnya mengelola keuangan daerah tidak hanya untuk mengejar target atau indikator formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan tanggung jawab jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan keuangan daerah. Teori *Stewardship* menekankan prinsip loyalitas, komitmen moral, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya publik (Davis et al., 1997:25 ; Mardiasmo, 2020:44).

Adanya pengaruh negatif ini dapat diasumsikan terjadi karena pencapaian kinerja keuangan yang tinggi tidak dibarengi dengan kualitas belanja atau pengelolaan keuangan yang bijak. Beberapa daerah mungkin lebih fokus pada pencapaian rasio-rasio keuangan tanpa memperhatikan efisiensi substansial, seperti memaksakan belanja di akhir tahun (*budget rush*), mengalokasikan anggaran ke pos-pos yang tidak produktif, atau terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini

sejalan dengan pendapat Mahmudi (2023:132) dan Suwandi (2021:88) yang menyatakan bahwa keberhasilan keuangan daerah tidak cukup dinilai dari sisi administratif semata, tetapi harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, serta kontribusinya terhadap keberlanjutan keuangan. Praktik *'budget rush'* di akhir tahun juga dikritisi oleh BPK RI (2022:75) karena berisiko menurunkan kualitas belanja dan mengurangi manfaat jangka panjang dari pengeluaran publik. Hal tersebut justru mengarah pada risiko keuangan jangka panjang, yang menyebabkan menurunnya tingkat keberlanjutan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Maulana (2022:84) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap *Financial Sustainability*.

Pengaruh Rasio Utang Secara Parsial terhadap *Financial Sustainability*

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis t diketahui bahwa variabel Rasio Utang memiliki t_{hitung} sebesar 0,391042. Nilai t_{hitung} tersebut menunjukkan angka lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,13145 atau ($0,391042 < 2,13145$). Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh variabel rasio utang sebesar 0,6975 yang menunjukkan bahwa $0,6975 > 0,05$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial rasio utang tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability*, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak.

Pemerintah daerah di Indonesia (termasuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir dan Pagar Alam masih bergantung besar pada transfer pusat, dengan proporsi pendapatan asli daerah di bawah 10%. Sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri secara keuangan karena masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sehingga kebijakan keuangan daerah sangat bergantung pada kebijakan pusat (Kemenkeu DJPK, 2023:18).

Penolakan hipotesis ini dapat dijelaskan dan diperkuat dengan mengaitkannya dengan teori *Stewardship*. Teori *Stewardship* berpendapat bahwa manajer (disebut juga *steward*) adalah pelayan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab yang termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi, bahkan melebihi tujuan pribadi mereka. Berbeda dengan teori agensi yang mengasumsikan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, teori *stewardship* berasumsi bahwa manajer bertindak sebagai pengelola aset yang bijaksana dan memiliki komitmen tinggi terhadap kinerja dan keberlanjutan organisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya rasio utang daerah dalam periode pengamatan tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap *Financial Sustainability*. Artinya, pengelolaan keuangan daerah, tingkat ketergantungan pada utang tidak secara langsung menentukan apakah suatu daerah mampu mencapai kondisi keuangan yang berkelanjutan.

Dalam teori *Stewardship*, pengelola sektor publik dianggap sebagai *steward*, yaitu individu yang bertindak demi kepentingan kolektif dan jangka panjang organisasi, termasuk dalam hal pengambilan keputusan keuangan. Teori ini mengedepankan prinsip bahwa pengelolaan keuangan yang etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan akan menghasilkan dampak positif bagi organisasi maupun masyarakat. Ketiadaan pengaruh signifikan dari rasio utang

terhadap *financial sustainability* dalam penelitian ini bisa mencerminkan bahwa penggunaan utang oleh pemerintah daerah telah dikelola secara hati-hati dan sesuai prinsip kehati-hatian keuangan, sehingga tidak membebani keuangan daerah secara jangka panjang.

Namun, hasil penelitian ini justru menolak hipotesis adanya ketiadaan pengaruh signifikan Rasio Utang terhadap *Financial Sustainability*. Ini menguatkan argumen teori *Stewardship*. Jika manajer bertindak sebagai *steward* yang setia, mereka akan menggunakan utang secara bijaksana untuk kepentingan terbaik organisasi. Rasio utang yang tidak signifikan menunjukkan bahwa manajer tidak menggunakan utang untuk tujuan pribadi atau spekulatif yang merusak keberlanjutan. Sebaliknya, mereka akan mengelola utang sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan. Temuan ini menyiratkan bahwa kualitas manajemen dan komitmen terhadap tujuan organisasi mungkin lebih berperan daripada rasio utang dalam menentukan *financial sustainability*. Para *steward* berfokus pada kesehatan fundamental perusahaan, termasuk efisiensi operasional, pengelolaan aset, dan penciptaan nilai jangka panjang, sehingga Rasio Utang menjadi salah satu instrumen yang dikelola dengan cermat, bukan faktor penentu utama keberlanjutan.

Dengan demikian, meskipun variabel rasio utang secara statistik tidak menunjukkan pengaruh signifikan, hasil ini tetap konsisten dengan prinsip *stewardship*, di mana pengelolaan utang yang cermat dan bertanggung jawab tidak selalu menimbulkan risiko terhadap *Financial Sustainability*. Sebaliknya, ketepatan dalam memutuskan kapan, untuk apa, dan seberapa besar utang digunakan merupakan bentuk nyata dari perilaku *steward* yang mengutamakan kepentingan jangka panjang masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi dan Ramadhani (2022:115), rasio utang daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan utama.

Pengaruh Kemandirian, Efisiensi, Kinerja Keuangan dan Rasio Utang terhadap *Financial Sustainability*

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis pada uji F dapat diketahui bahwa variabel Kemandirian, Efisiensi, Kinerja Keuangan, dan Rasio Utang memiliki nilai F_{hitung} sebesar 6,326983. Hasil dari nilai F_{hitung} tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari F_{tabel} yaitu 3,410534 atau ($6,326983 > 3,410534$). Kemudian nilai signifikansi yang diperoleh variabel kemandirian, efisiensi, kinerja keuangan dan rasio utang sebesar 0,000000 yang mana menunjukkan bahwa ($0,000000 < 0,05$). Hasil uji F tersebut menunjukkan bahwa secara simultan Kemandirian, Efisiensi, Kinerja Keuangan, dan Rasio Utang berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima.

Hasil dari nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini digunakan untuk dapat mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel independen yaitu kemandirian, efisiensi, kinerja keuangan, dan rasio utang terhadap *Financial Sustainability*. Nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0.476536. Hal ini

menunjukkan bahwa hanya 47,6% variabel *Financial Sustainability* dapat dijelaskan oleh variabel kemandirian, efisiensi, kinerja keuangan, dan rasio utang. Sisanya 52,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan keuangan daerah dipengaruhi secara bersamaan oleh kombinasi dari kemandirian, efisiensi, kinerja keuangan, dan rasio utang. Keempat faktor ini saling terkait dalam membentuk kemampuan suatu daerah untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Dalam teori *stewardship* memandang bahwa pengelola organisasi, termasuk dalam sektor publik, bertindak sebagai *steward* yaitu pihak yang secara intrinsik termotivasi untuk bertindak demi kepentingan jangka panjang organisasi dan masyarakat. Dalam keuangan daerah, *stewardship* diwujudkan dalam bentuk tata kelola yang bertanggung jawab, etis, dan akuntabel terhadap sumber daya keuangan. Hasil uji F ini sejalan dengan teori *Stewardship*, karena menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik dan kolektif yang mencakup kemandirian, efisiensi, kinerja, dan kehati-hatian akan berkontribusi pada pencapaian *financial sustainability*. Ini membuktikan bahwa perilaku pengelolaan berbasis *stewardship* tidak hanya etis, tetapi juga efektif secara empiris dalam memperkuat ketahanan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Kemandirian secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan belanjanya sendiri tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat cenderung memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik, daya tahan anggaran yang lebih kuat, serta kontrol anggaran yang lebih efektif.
2. Variabel Efisiensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sehingga H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang mampu mengelola anggaran secara efisien dapat meminimalkan pemborosan, memaksimalkan hasil dari pengeluaran publik, dan menempatkan belanja pada sektor-sektor produktif cenderung memiliki ketahanan keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang.
3. Variabel Kinerja Keuangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability*, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak. Karena memang terbukti ada pengaruh, tetapi arah pengaruhnya negatif. Jadi, semakin baik kinerja keuangan maka *financial sustainability* menurun atau sebaliknya. Ini terjadi jika belanja daerah ditekan untuk meningkatkan efisiensi jangka pendek, tapi mengabaikan kemampuan keuangan jangka panjang.

4. Variabel Rasio Utang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability*, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 ditolak. Ini menunjukkan bahwa besar kecilnya rasio utang daerah dalam periode pengamatan tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap *Financial Sustainability*. Artinya, pengelolaan keuangan daerah, tingkat ketergantungan pada utang tidak secara langsung menentukan apakah suatu daerah mampu mencapai kondisi keuangan yang berkelanjutan.
5. Variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Efisiensi, Kinerja Keuangan dan Rasio Utang secara simultan signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,6139 atau 61,3%. Ini berarti model mampu menjelaskan *Financial Sustainability* sebesar 38,7%, sedangkan sisanya 52,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Obaidi, S. J., & Almashadani, H. A. (2023). Fiscal decentralization and local government borrowing behavior: Evidence from developing regions. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(1), 110–125.
- Alcaidei Muiñoz, L.(2018). Analysing thei accounting meiasuireimeint of financial suistainability in local goveirnmeints through political factors. *Accounting, Auiditing and Accountability Jouirnal*,31(8).
- Arifin, T., & Nurkholis. (2022). *Financial sustainability analysis: Evidence from local government in Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(1), 45–58.
- Aryasi, P. P., Periansya, P., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Kemandirian, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Indikator fiscal kesehatan daerah*. BPK RI. <https://www.bpk.go.id>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis :Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. PT. Rajagrafindo Persada
- Bisogno, M., Cuiadrado-Balleisteiros, B., & García-Sáncheiz, I. M. (2017). Financial suistainability in local goveirnmeints: Deifinition, meiasuireimeint and deiteirminants. In *Financial Suistainability in Puiblic Administration: Eixploring thei Concept of Financial Heialth*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57962-7_3
- Bowman, W. (2011). *Finance fundamentals for nonprofit managers: With workbook exercises*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. *Academy of Management Review*, 16(1), 49-64
- Efisiensi dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Sustainability Pada

- Fatoni, A., & Nurhayati, N. (2013). *Pengaruh efisiensi belanja terhadap kemandirian daerah: Studi empiris pada kabupaten/kota di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Daerah, 1(2), 95–105.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, A. (2019). *Manajemen keuangan daerah* (Edisi revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Handayani. (2020). Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248-253.
- Hidayat, A., Hadi, S., & Widiarsih, S. (2016). *Kinerja keuangan pemerintah daerah: Teori dan pengukuran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keberlanjutan Fiskal: Perspektif Teori Stewardship." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Publik*, 7(1), 51–65. Kelola Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 45-56
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang pedoman pengelolaan pinjaman daerah*. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The political economy of local tax allocation: Evidence from a policy reform in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 366–389.
- Laporan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023
- Lubis, R., & Riyanto, S. (2021). Financial performance and fiscal sustainability of local governments in Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Publik*, 8(2), 121–133.
- Mahmudi, M. (2023). *Akuntansi Sektor Publik: Perspektif Kinerja dan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi 4*. UPP: STIM YKPN
- Muin, M. A. (2014). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah: Teori dan praktik*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- OECD. (2023). *Ensuring Long-Term Fiscal Sustainability in Local Governments*. OECD Publishing.
- Pandawangi.S. (2021). Metodologi Penelitian. *Journal Information*, 4, 1–5.
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan.

- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Pertiwi, M. E., & Sunardi. (2023). Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap keberlanjutan fiskal pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 61–72.
- Poenya, R. R. (2021). Uji Asumsi Klasik. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5–24.
- Putri, A. D., & Nurhasanah, L. (2020). Efisiensi Anggaran dan Implikasinya terhadap Keberlanjutan Fiskal Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Daerah*, 8(1), 55–65.
- Putri, A. S., & Hasanah, U. (2020). Efisiensi belanja pemerintah dan implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 94–105.
- Raharjo, S. (2007). *Teori-teori organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Rahmat, M., & Lubis, A.F. (2021). Penerapan *Stewardship Theory* dalam Tata
- Rahmawati, D., & Indrawati, L. (2020). Pengaruh kemandirian fiskal dan belanja modal terhadap keberlanjutan fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 123–132.
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galeira, A., López Suibirés, M. D., &
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2019). *Analysis Efficiency and Effectiveness Regional Financial Management in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. *Jurnal EMBA*, 23(4), 23–32
- Rusdiyanto, Agustia, D., & Soetedjo, S. (2019). *Stewardship theory dalam tata kelola perusahaan*. Surabaya: Lembaga Penerbit Universitas Airlangga. SEIKO : *Journal of Management & Business*, 6(2), 544–555.
- Siahaan, R., & Heraati, N. (2022). Pengaruh kinerja keuangan terhadap keberlanjutan fiskal pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Fiskal*, 15(1), 34–47.
- Subroto, B., & Sutaryo. (2020). "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap
- Sudaryati, E. (2013). *Kemandirian daerah dalam perspektif desentralisasi fiskal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D Edisi1*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, I. (2019). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 38–46.
<https://doi.org/10.34010/jra.v11i2.2673>

Susanti, R., & Wardhani, R. (2021). Efisiensi belanja pemerintah daerah dan dampaknya terhadap keberlanjutan fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 12(1), 65–78.

Suwandi. (2021). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Evaluasi Fiskal Berbasis Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers

Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 65–77.
<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya

Usman, A., & Paranoan, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Teori dan aplikasi*. Makassar

Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wijaya, D., & Saputra, A. (2021). Analisis rasio utang dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan fiskal daerah. *Jurnal Keuangan Negara*, 6(1), 88-102.

Yusuf, M., Firmansyah, R., & Arfan, M. (2021). Analisis kinerja keuangan dan keberlanjutan fiskal pada pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 40–50.